BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi di Indonesia secara resmi dimulai sejak dimulainya rencana pembangunan lima tahun (Repelita I) pada tahun 1969 dan prosesnya berjalan mulus selama beberapa dekade 1970-an dan 1980-an (Tambunan, 2001;39).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999;11). Sebagai suatu proses, maka pembangunan ekonomi mempunyai kaitan dan pengaruh antara faktor - faktor di dalamnya yang dapat menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut. Selanjutnya pembangunan ekonomi akan tercermin pada kenaikan pendapatan perkapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu keberhasilan usaha negara tersebut untuk mendistribusikan pendapatan secara merata dan adil serta dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di negara tersebut.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indeks ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan. Indeks ini mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkatan dan laju

pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) perkapita riil merupakan tolak ukur ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran ekonomi suatu negara.

Negara Indonesia secara geografis dan klimatalogis merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dengan garis pantai yang terluas di dunia, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, hutan dan kandungan bumi Indonesia yang sangat kaya, merupakan bahan yang utama untuk membuat negara menjadi kaya. Suatu perencanaan yang mampu memanfaatkan semua bahan baku tersebut secara optimal, akan mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Ini terlihat pada hasil Pelita III sampai dengan Pelita V yang dengan pertumbuhan ekonomi rata - rata 7% - 8% membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun ternyata semua pertumbuhan ekonomi tersebut tidak memberikan dampak yang cukup berarti pada usaha pengentasan kemiskinan. Indonesia merupakan sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian besar rakyatnya tergolong masyarakat miskin. Pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 - 1999 penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 24% dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. pada tahun 2002 angka tersebut sudah turun menjadi 18% dan menjadi 14% pada tahun 2004. Situasi terbaik terjadi antara tahun1987 - 1996 ketika angka rata - rata kemiskinan berada di bawah 20%, dan yang paling baik adalah pada tahun 1996 ketika angka kemiskinan hanya mencapai 11,3%.

Perkembangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel. 1.1. berikut ini:

Tabel. 1.1.
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia tahun 2004 – 2008

Tahun	Presentase penduduk miskin (dalam persen)			Jumlah Penduduk miskin (dalam juta orang)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2004	12,13	20,11	16,66	11,40	24,80	36,10
2005	11,68	19,98	15,97	12,40	22,70	35,10
2006	13,47	21,81	17,75	14,49	24,81	39,30
2007	12,52	20,37	16,58	13,56	23,60	37,16
2008	11,65	18,93	15,42	12,77	22,19	34,97

Sumber: BPS, Statistik Indonesia (Susenas) ; diolah

Berdasarkan Tabel. 1.1. dapat dilihat perbandingan penduduk desa dan kota yang miskin dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sangat berbeda. Laju perkembangan penduduk miskin di desa maupun di kota mengalami keadaan naik turun dalam perkembangan dari tahun 2004 sampai tahun 2008.

Cara pendistribusian pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan - perubahan dan perbaikan - perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan - kesulitan lain yang ada di masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistim distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya mengunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari survai sosial ekonomi nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendataan untuk mengukur distribusi pendapatan

masyarakat, walaupun diakui bahwa cara demikian seharusnya mempunyai suatu kelemahan yang serius. Penggunaan data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat. Alasanya sederhana, jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak sama dengan pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih kecil. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi salah satu masalah yang besar bagi negara–negara berkembang seperti Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut - larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Alat ukur atau media yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien gini *(Gini Ratio*) dan cara perhitungan yang digunakan oleh bank dunia (*World Bank*). Pada tabel. 1.2. berikut terlihat pola distribusi pendapatan dan koefisien gini untuk beberapa tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.2.
Persentase Jumlah Pengeluaran Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran dan Angka Gini

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20%Tertinggi	Angka Gini
2004	20,92	36.89	42,19	0,32
2005	30,57	37,10	42,33	0,32
2006	20,80	37,13	42,07	0,32
2007	20,22	37,09	42,09	0,33

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008

Berdasarkan Tabel. 1.2. maka dapat dikatakan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), terlihat selama periode 2002 - 2005 tingkat ketimpangan pendapatan (dengan pendekatan pengeluaran) penduduk Indonesia tergolong rendah. Hal ini tampak dari persentase pengeluaran penduduk pada kelompok 40% terendah angkanya selalu diatas 20%..

Di negara - negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, perhatian utama terfokus pada delima kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. keduanya sama - sama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan secara bersama. Pengutamaan yang satu akan mengorbankanya yang lain. Pembangunan ekonomi menghendaki GNP yang lebih tinggi, untuk itu diperlukan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun yang menjadi kendala bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melakukan dan berhak menikmati hasil - hasil pembangunan. (Todaro, 2000:177).

Di Indonesia, strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil - hasil pembangunan di mulai sejak Pelita III, strategi ini sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil - hasil yang dicapai harus dapat di

nikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kebijakan pembangunan dengan prioritas pemerataan hasil - hasil pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan melalui perbaikan pendapatan masyarakat masih harus dilaksanakan karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Sebagian besar (hampir 70%) penduduk dunia yang termiskin berada di wilayah pedesaan yang penghidupan pokoknya bersumber dari pola pertanian. Bagi mereka, bagaimana mempertahankan hidup sehari - hari sudah menjadi masalah pokok yang menyita banyak perhatian dan tenaga. Jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka ia harus memulainya dari daerah pedesaan pada umumnya, dan sektor pertanian pada khususnya, maka betapa pentingnya arah kebijakan pembangunan yang berwawasan pemerataan, khususnya pembangunan pedesaan.

Kepemilikan lahan pertanian per kepala keluarga rata - rata relatif sempit, sedangkan tingkat ketergantungan (beban) per kepala keluarga cukup tinggi, maka masyarakat pedesaan tidak sepenuhnya tergantung pada sektor pertanian. Mereka berusaha mencari tambahan pendapatan diluar kegiatan usaha taninya. Sebagai buruh bangunan, tukang kayu, buruh pabrik, dan bahkan tidak jarang yang bekerja di perkotaan. Pendapatan diluar usaha tani tersebut mampu memberikan tambahan kontribusi dalam pembentukan pendapatan mereka (Sukamto, 1993:5)

Tabel. 1.3.
Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006 – 2008 (Dalam Rupiah)

Tahun*	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Kota	Desa	Kota + Desa
2006	174.290	130.584	151.997
2007	187.942	146.837	166.697
2008	204.896	161.636	182.636

Sumber: Data Susenas; diolah
Keterangan: * Data diambil pada bulan Maret tiap tahunnya

Dari tahun 2006 sampai dengan 2008 garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikkan ini didasarkan pada perubahan harga dan kenaikkan harga - harga kebutuhan pokok. Seperti yang terlihat pada tabel. 1.2. pada tahun 2006 garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp. 151.997,- dan meningkat menjadi Rp. 182.636,- pada tahun 2008. Ini juga berpengaruh pada garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Daerah pedesaan sendiri memiliki garis kemiskinan jauh lebih kecil dari daerah perkotaan. Tahun 2006 garis kemiskinan kota sebesar Rp. 174.290,- sedangkan desa sebesar Rp. 130.584,- meningkat pada tahun 2008 di kota sebesar Rp. 204.896,- dan desa sebesar Rp. 161.636,-.

Berdasarkan Tabel. 1.4. di bawah diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Jawa Tengah mendekati Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari sebesar 64,43 pada tahun 2004 menjadi sebesar 68,54 pada tahun 2008.

Tabel. 1.4.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2004 – 2008

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
	Indonesia	Jawa Tengah	Rembang
2004	68,70	64,43	58,73
2005	69,57	65,59	59,26
2006	70,10	67,14	61,13
2007	70,59	67,96	61,84
2008	71,17	68,54	62,57

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS 2009

Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah sangat beraneka ragam antar kabupaten yang ada. Ada yang masih dibawah rata – rata IPM propinsi dan ada juga yang sudah di atas rata – rata IPM propinsi. Namun, secara keseluruhan masih di bawah rata – rata propinsi. Salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah. IPM di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, IPM Kabupaten Rembang adalah sebesar 58,73 dan meningkat menjadi sebesar 62,57 pada tahun 2008.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini akan menganalisa pendapatan masyarakat nelayan. Bagaimana pendapatan dalam masyarakat tersebut terdistribusikan serta indeks pembangunan manusia di daerah penelitian, yang dirumuskan dalam topik sebagai berikut: “ Analisis Pola Distribusi Pendapatan Pada Masyarakat Nelayan Pantai (Studi Kasus di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah) 2010.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pola distribusi pendapatan pada masyarakat nelayan pantai, studi kasus di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah tahun 2010.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan khususnya masyarakat nelayan pantai.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini meliputi:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi kebijakan pengelolaan dan perkembangan usaha perikanan di Kabupaten Rembang. Selain itu, dapat menjadi informasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pantai.

1.6. STUDI TERKAIT

Esmara (1975) melakukan penelitian berdasarkan pendekatan pengeluaran, hasil penelitiannya menunjukan ketimpangan distribusi pendapatan secara regional di Indonesia. Studi Esmara menggambarkan bahwa sementara ini pulau Jawa menyumbang 60% dari produk domestik regional bruto (PDRB) tetapi

kepadatan penduduk di pulau Jawa menyebabkan pendapatan perkapita berada dibawah pendapatan perkapita nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Rajagukguk dan Wilson Rajagukguk (2000) tentang analisis pendapatan dan kemiskinan di Indonesia pada waktu sebelum terjadinya krisis ekonomi dan sesudah terjadi krisis ekonomi secara nasional dan provinsi, serta membuat proyeksi pendapatan. Persentase distribusi pengeluaran dan koefisien gini berdasar data susenas digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Studi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia sampai menjelang krisis ekonomi, kemiskinan meningkat. Dalam masa tiga puluh tahun terakhir, tingkat ketidakseimbangan distribusi pendapatan yang terjadi rendah dan tidak banyak berubah walaupun telah dilanda krisis ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2002) tentang distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1994 – 2000. Variabel yang digunakan adalah indeks gini dan indikator kesejahteraan. Penelitian ini menyatakan bahwa distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam kategori ketidakmerataan rendah dengan indeks gini sebesar 0,27.

Penelitian yang dilakuakan oleh Ravik Karsidi (2002) tentang pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil, penelitian ini bermaksud menguraikan tentang arah tantangan bidang pertanian dan perikanan/nelayan, pentingnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil

Penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2003) tentang distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi Sumatera Barat pada tahun 1996 – 2006. Variabel yang digunakan adalah indeks gini dan indeks mutu hidup. Penelitian ini menyatakan bahwa distribusi pendapatan di provinsi Sumatera Barat berada dalam kategori ketidakmerataan rendah yang berarti bahwa pendapatan terdistribusikan secara relatif merata. Rata–rata distribusi pendapatan selama periode penelitian adalah 0,30.

Penelitian yang dilakukan Laila Fitriyah (2006) tentang stratifikasi sosial dan hubungan kerja nelayan studi kasus desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan sosial, ekonomi, dan budaya nelayan Desa Jatimalang dan mengetahui fenomena stratifikasi sosial dan hubungan kerja nelayan.

Penelitian yang dilakuakn oleh Efendi Arianto (2008) tentang ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan indikator yang digunakan adalah koefisien gini. Penelitian ini menyatakan bahwa Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorenz itu berada.

1.7. DEFINISI OPERASIONAL

1.7.1. Pendapatan

Pendapatan masyarakat yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan pendapatan yang berasal dari pembentukan – pembentukan pendapatan dari segala aktivitas mata pencahariannya.

Pendapatan yang dianalisis adalah pendapatan per kepala keluarga juga akan diestimasi pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kepala keluarga diperoleh dengan membagi keseluruhan total pendapatan responden dengan jumlah sampel. Rata – rata pendapatan per kapita diestimasi dengan membagi keseluruhan total pendapatan responden dengan jumlah beban tanggungan termasuk responden itu sendiri.

1.7.2. Pola Distribusi Pendapatan

Pola distribusi pendapatan adalah bagaimana keseluruhan pendapatan (dari responden) terdistribusi, yaitu dengan merangking pendapatan masing – masing responden dari responden dengan pendapatan tertinggi hingga responden dengan pendapatan terendah. Setelah diperoleh rangking pendapatan responden kemudian membagi rangking tersebut menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu:

1. 20 % responden dengan pendapatan tertinggi, yang selanjutnya disebut kelompok 20% atas (TOP 20%).
2. 40 % responden dengan pendapatan menengah, yang selanjutnya disebut kelompok 40% menengah (MIDDLE 40%).
3. 40 % responden dengan pendapatan terendah, yang selanjutnya disebut keompok 40% bawah (BOTTOM 40%).

Setelah diperoleh tiga kelompok pendapatan dalam penelitian ini juga dianalisis pendapatan per kapita dari masing - masing kelompok pendapatan.

1.7.3. Komposisi Pengeluaran

Komposisi pengeluaran per tahun per kepala keluarga responden dalam penelitian ini meliputi:

a. Pengeluaran untuk kegiatan produksi, yaitu keseluruhan pengeluaran responden yang dipakai untuk usaha nelayan.
b. Pengeluaran konsimsi bahan makanan, yaitu keseluruhan pengeluaran rata - rata setiap keluarga responden untuk biaya makan.
c. Pengeluaran untuk konsumsi bahan pakaian, yaitu keseluruhan pengeluaran rata – rata setiap tahunnya yang dikeluarkan per keluarga untuk membeli bahan pakaian.
d. Pengeluaran untuk konsumsi alat - alat Rumah Tangga.
e. Pengeluaran untuk pemeliharaan rumah.
f. Pengeluaran untuk biaya pendidikan, yaitu pengeluaran untuk biaya sekolah (SPP dan sarana belajar) bagi seluruh anggota keluarga yang masih sekolah.
g. Pengeluaran untuk biaya kemasyarakatan (sosial), yaitu keseluruhan rata - rata per kepala keluarga per tahun untuk keperluan kemasyarakatan.

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1 Metode Dasar

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskriptifkan dan menganalisis secara terperinci fenomena sosial yang ada (Soerachmand, 1975). dan Amaluddin (1987), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan realita sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep - konsep teori yang telah di kembangkan oleh ilmuwan sosial.

Studi ini juga mengunakan analisis kuantitatif melalui pendekatan - pendekatan teori dalam ekonomi pembangunan, yaitu menggunakan analisis pola distribusi pendapatan, dan untuk melihat atau menentukan Kurva Lorenz dan indeks gini. Pendekatan ini dalam rangka untuk melihat pola distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif ini juga untuk melihat di dalam menganalisis kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.

1.8.2 Metode Pemilihan Responden

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di 10 desa (Tanjungan, Kebloran, Karang Anyar, Karang Lincak, Karang Harjo, Kragan, Tegal Mulyo, Plawangan, Pandangan Wetan, Pandangan Kulon), Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tahun 2010. Nelayan yang menjadi sasaran penelitian ini merupakan sebagian nelayan dari komunitas nelayan yang bermukim di 10 desa tersebut. Nelayan yang menjadi responden sebanyak 100 orang.

Dalam metode pengumpulan sampel, digunakan metode *Purposive Random Sampling*, yaitu berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang baik untuk dijadikan sampel penelitian

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder. Sumber data adalah nelayan (pada perahu/kapal perorangan kecil), informan (toko masyarakat, pamong desa, pengurus tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengurus koperasi (KUD)). Data yang diambil dari responden nelayan meliputi profil nelayan, jenis perahu dan alat tangkap, jumlah kelompok dalam perahu, dan

pembagian hasil. Data yang diambil dari informan meliputi pendapat tentang fenomena stratifikasi sosial yang terjadi dikalangan nelayan, perkembangan perikanan, serta permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.

Data sekunder mencangkup monografi dinamis dan statis desa penelitian. Data sekunder diperoleh dari kantor kelurahan desa penelitian, koperasi (KUD), TPI yang berada di desa penelitian, dan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang.

1.8.4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, diskusi kelompok nelayan, dan studi kepustakaan. Kunjungan kepada responden dan informan dilakukan pada siang, sore, dan malam hari, disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang dilakukan responden.

1. Wawancara langsung dengan responden tentang masalah yang diteliti dengan mengunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terstruktur dan bersifat terbuka untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian. Wawancara juga dilakukan dengan informan yang diangap sebagai pihak yang mampu memberikan informasi secara menyeluruh dan mengetahui fenomena sosial yang sesungguhnya terjadi.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, yang meliputi hubungan sosial masyarakat, serta sistem budaya yang berlaku pada masyarakat dari desa penelitian. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati tingka laku masyarakat dilokasi penelitian yang dapat menunjang data lapangan yang diperoleh.

3. Diskusi kelompok nelayan dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat nelayan secara umum tentang pelapisan sosial dan hubungan kerjanya.
4. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang menyangkut pokok - pokok bahasan terutama yang berkaitan dengan gambaran umum desa yang menjadi lokasi penelitian.

1.8.5 Metode Analisis Data

1.8.5.1.Indeks Gini

Secara matematis rumus Koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut (Arsyad, 2004; 232-233):

$$KG = 1 - \sum_{1}^{n} (X_{1+i} - X_1)\,(Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana:

KG = Angka Koefisien gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Koofisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara nol (kemerataan sempurna) sampai satu (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara - negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36 - 0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35 (Arsyad, 2004; 232-233).

1.8.5.2 Kurva Lorenz

Gambar. 1.1. Kurva Lorenz

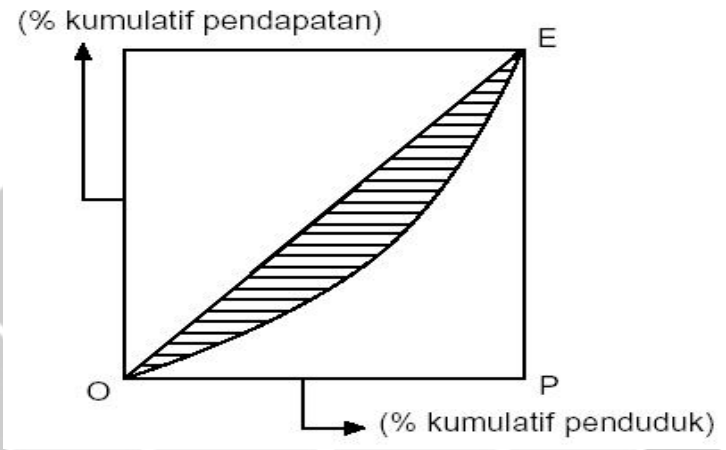

Sumber: http://www.e-dukasi.net

Kurva Lorenz menunjukan hubungan kuantitatif *aktual* antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar - benar mereka terima selama, misalnya satu tahun (Todaro dan Smith, 2004; 223). Semakin jauh Kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukan, dan sebaliknya jika semakin mendekati garis kemerataan sempurna maka maka semakin rendah derajat ketidakmerataannya.

1.8.5.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejak tahun 1990 *United Nations for Development Program* (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks =HDI*). Indikator - indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah: (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek hruf masyarakat, dan (3) tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing - masing Negara (Arsyad, 2004; 37).

Rumus perhitungan *Human Development Indeks* (HDI) dengan menghitung terlebih dahulu indeks (komponen - komponen HDI) sebagai berikut:

Indeks $X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i)\ min}] / [X_{(i)\ max} - X_{(i)\ min}]$

Di mana:

$X_{(i)}$: Indikator ke-i (i=1,2,3); $X_{(i)\ max}$: nilai maksimum $X_{(i)}$, $X_{(i)min}$:nilai minimum $X_{(i)}$. Berdasarkan prosedur di atas, maka HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

HDI = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]

Di mana: $X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup kelahiran

$X_{(2)}$ = Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Isi dari pendahuluan mencangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terkait, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Gagasan dalam landasan teori mencangkup tentang tinjauan pustaka yang membahas teori tentang analisis pendapatan dan distribusi pendapatan.

BAB III Gambaran Umum Daerah Penelitian.

Cangkupan dari gambaran umum lokasi penelitian adalah tentang pengenalan secara umum daerah penelitian

BAB IV Analisis Data

Menguraikan tentang pengelolaan data yang dilakukan dengan menggunakan teori - teori yang telah di temukan ilmuwan sebelumnya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sekaligus memberikan saran, masukan bagi intansi - intansi terkait dalam penelitian guna memberikan kemajuan dari daerah yang diteliti.